

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan kinerja Dinas Perhubungan dalam penarikan retribusi baik yang hadapi oleh Dinas Perhubungan maupun juru parkir yang melakukan penarikan retribusi parkir di lapangan sehingga berpengaruh pula terhadap pendapatan daerah Kota Kupang. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pengelolaan Retribusi Parkir dapat dilihat melalui:

1. **Produktivitas Dinas Perhubungan dalam Perencanaan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang**

Produktivitas dari pegawai Dinas Perhubungan belum dijalankan secara maksimal. Apalagi dengan pegawai yang masih kurang tepat waktu dalam melakukan pengawasan. Padahal perlu disadari bahwa ketepatan waktu sangat menentukan hasil pengelolaan retribusi parkir. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil retribusi tahun 2019 hingga tahun 2020. Realisasi retribusi parkir di jalan umum dan jalan khusus tahun 2019 tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun 2020, retribusi jalan umum mengalami penurunan dari target/perencanaan yang telah ditentukan sedangkan retribusi jalan khusus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang produktivitas dari dinas perhubungan selaku pengawas dalam retribusi parkir. Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam penarikan retribusi ada beberapa yang telah dijalankan secara maksimal seperti melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD berkenaan(BKD, Bagian Hukum Kota Kupang), melakukan panel secara professional dan menyiapkan data pengelola yang prestasi dan gagal. Sedangkan perencanaan yang belum maksimal dijalankan seperti ; menyiapkan

pegawai terkait pelaksanaan pada parkir ditepi jalan umum dan parkir khusus, monitoring dan evaluasi karena keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Selain itu, adapaun faktor penghambat dalam penarikan retribusi diantaranya, pengelola sering lalai dalam melakukan penyetoran dan juru parkir sering mendapat tekanan dari pemuda setempat untuk meminta jatah setiap hari. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Kupang sendiri seperti yang tertera dalam tabel 5.1 diatas. Selain itu, Profesi juru parkir sebenarnya membantu pengendara dalam memarkirkan kendaraannya anak tetapi diantara pemilik kendaraan ada yang kurang bekerjasama dalam membayar parkir.

## 2. Responsivitas Dinas Perhubungan dalam Penggerakan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan Kota Kupang terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan parkir yang aman dan nyaman. Dinas Perhubungan akan selalu terbuka dalam menanggapi segala kebutuhan dan keluhan masyarakat maupun pihak juru parkir. Apabila keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dalam penarikan retribusi parkir maupun pelayanan dari juru parkir yang kurang baik maka akan ditindaklanjuti oleh Dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan selaku pengawas dilapangan. Penggerakan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Penarikan Retribusi Parkir seperti, Melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir yang dilakukan tiap satu kali dalam sebulan. Pengawasan ini dilakukan oleh tim patroli Dinas Perhubungan dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan ke setiap kawasan yang ada, memberikan arahan kepada para petugas juru parkir agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab dengan tujuan untuk memperkecil kecurangan dalam penarikan retribusi, mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah dan memberikan peringatan yaitu berupa peringatan bagi yang melanggar dan melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi, melakukan penertiban kepada para juru parkir yang

tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan parkir tempat dimana mereka meraup keuntungan. Akan tetapi hal ini belum tentu dapat berjalan efektif dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya sebulan sekali dilakukan, padahal dengan banyaknya masalah yang dihadapi dalam penarikan retribusi perlu dilakukan pengawasan yang lebih intens lagi karena hal ini sangat berpengaruh pula pada pendapatan yang terealisasi.

### 3. Akuntabilitas Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang

Akuntabilitas yaitu kebijakan dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan kebijakan ini bersifat dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah transparan terhadap atasan maupun masyarakat. Pihak Dinas Perhubungan sudah bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya, akan tetapi pihak juru parkir sulit untuk diajak bekerjasama untuk lebih jujur dalam melakukan penarikan retribusi apabila sejak peristiwa covid-19 ini. Untuk itu, dalam merekrut juru parkir harus lebih selektif dan pengawasannya harus lebih intens dan rutin agar tidak terjadi kecurangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dilapangan seperti; keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan tenaga. Adapaun masalah yang sering alami oleh juru parkir seperti masyarakat yang kurang biasa diajak untuk bekerjasama dalam membayar retribusi sehingga juru parkir hanya bisa memaafkan saja dan kadang juga mendapat tekanan dari pemuda setempat untuk meminta jatah. Padahal juru parkir juga bekerja dalam pengawasan Pemerintah. Selain itu, pengawasan yang hanya dilakukan sebulan sekali dirasa kurang efektif untuk mengatasi masalah kecurangan dalam penarikan retribusi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran yang penulis harapkan dapat berguna diantaranya:

1. Pihak Dinas Perhubungan harus lebih intens dalam melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tindak kecurangan dalam penarikan retribusi dapat diminimalisir sebaik mungkin sehingga pendapatan daerah Kota Kupang dapat meningkat.
2. Keterbatasan anggaran, tenaga dan sarana dan prasarana harus dipenuhi terlebih dahulu agar menunjang terlaksananya penarikan retribusi yang efektif.
3. Pihak-pihak yang terkait baik itu UPTD Pengelola Parkir, kepolisian maupun bagian pengendalian harus tegas dan aktif berkoordinasi dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir, menindak tegas juru parkir liar dan menindak tegas masyarakat yang parkir secara sembarangan pada tempat larangan parkir.
4. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya mengubah sistem pemungutan parkir dari sistem karcis ke sistem pemungutan elektronik karena manfaat yang bisa di dapat yaitu sistem perparkiran lebih aman, karena kendaraan yang masuk selalu terdata. Mengurangi antrian kendaraan, mudah dalam mengetahui pendapatan parkir, mudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan area parkir karena lengkapnya data yang terkumpul.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. BUKU**

Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27.

Clara Tami, R. I. N. D. A. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Dwiyanto, A. (2020). BAB 7 PENGAMATAN UNTUK MENILAI KINERJA PELAYANAN PUBLIK. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 268.

Kapioru, H. E. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 101-119.

Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

### **B. JURNAL**

Hanim, I.N. (2016). Manajemen pengelolaan infaqdi Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng: *Tinjauan teori manajemen George Terry* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Mulana Malik Ibrahim).

Adinda, N. R. R., Mustika, S. S., Wulandari, V. A., & Kundhani, E. Y. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Salatiga (Studi Kasus Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 4(2).

- Febriyanto, A. D., & Kismartini, K. (2017). Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Jalan Pandanaran. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 814-831.
- Fanggidae, F. O., & Kapioru, C. (2016). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 63-81.
- Fanggidae, Frits O. "Perkembangan Kapasitas Fiskal dan Ruang Fiskal Kota Kupang, 2010-2019." *Jurnal Inovasi Kebijakan* 5.1 (2020): 35-39.
- Hayati, S. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 195-26.
- Hamim, I. N. (2016). *Manajemen pengelolaan infaqdi Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng: Tinjauan teori manajemen George Terry* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kinanti, L., Yulianti, R., & Widyastuti, Y. (2021). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tangerang. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Mustanir, A., & Jusman, J. (2016). Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan terhadap Penerimaan Retribusi di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(3).
- Malombeke, Novelia. "Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak parkir di kabupaten minahasa utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.1 (2016).

- Maisal, M. L., & Tuati, N. F. (2017). Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. *Jaka-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 1(1), 17-31.
- Mintalangi, S. S. M. S., & Latjandu, L. D. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).
- Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 23-32.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 35-46.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47-55.